

Pendidikan Nasional: Pilar Utama Dalam Membangun Bangsa yang Berdaya Saing

Chanifudin¹ Sahari Rofiki² M. Maulidiyan Syah³

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
Indonesia^{1,2,3}

Email: chanifudin@kampusmelayua.ac.id¹ saharirofiki@gmail.com² maulidynsyh@gmail.com³

Abstrak

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional adalah mengembangkan keterampilan nasional yang bernilai, membentuk karakter dan peradaban, serta mencerdaskan kehidupan nasional yang ingin dicapai; Kemungkinan menjadi manusia yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut, Pasal 37(2) menyatakan bahwa kurikulum harus mencakup pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa. Ketiga mata pelajaran wajib tersebut menunjukkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk menghormati umat Indonesia yang beragama/beragama, bermasyarakat, dan berupaya mewujudkan bangsa yang dapat mengukuhkan jati diri bangsa melalui bahasa nasionalnya. Berbagai krisis multidimensi yang dialami masyarakat Indonesia saat ini tidak dapat ditangkap dan dikelola hanya dengan pendekatan satu dimensi saja. Namun karena akar krisis ini terletak pada rendahnya moralitas manusia, maka pendidikan agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun karakter bangsa yang bermartabat dan peradaban yang bermartabat.

Kata Kunci: Pendidikan, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Nasional

Abstract

In the National Education System Law Number 20 of 2003, article 3 states that national education functions to develop abilities and shape the character and civilization of a dignified nation in order to make the life of the nation intelligent, and aims to develop the potential of students so that they become human beings who believe and are devoted to God Almighty. One, noble character, healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and a democratic and responsible citizen. Furthermore, Article 37 paragraph (2) states that the education curriculum must contain Religious Education, Citizenship Education and Language Education. These three mandatory subjects indicate that the aim of national education is to try to create Indonesian people who are religious/religious, a nation that can respect its citizens and a national identity with its national language. The various multi-dimensional crises currently being experienced by the Indonesian people cannot only be seen and overcome with a mono-dimensional approach. However, because the root of this crisis is low human morals, religious education has a very big role in building a dignified national character and civilization.

Keywords: Education, Islamic Religious Education, National Education



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, pendidikan nasional adalah sebuah kekuatan. Theodore Brameld menyatakan bahwa pendidikan adalah kekuatan, yang berarti bahwa dengan pendidikan, seseorang dapat menguasai dunia. Sejalan dengan itu, Francis Bacon berpendapat bahwa pengetahuan adalah kekuatan. Hal ini juga didukung oleh sabda Rasulullah saw yang mengatakan: Barang siapa yang menginginkan dunia, makakuasailah ilmu; barang siapa yang menginginkan akhirat, maka kuasailah ilmu; dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka kuasailah ilmu. Oleh karena itu, pentingnya pendidikan nasional dalam kehidupan

bangsa dan negara semakintidak diragukan lagi¹. Menyadari pentingnya peran pendidikan nasional, visi pendidikan yang tercantum dalam Penjelasan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah terciptanya sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa sebagai pranata sosial. Tujuannya adalah untuk memberdayakan seluruh warga negara Indonesia agar berkembang menjadi individu berkualitas yang mampu dan proaktif dalam menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah. Berdasarkan visi ini, diharapkan pendidikan nasional menjadi faktor strategis dalam pembangunan bangsa Indonesia dimasa depan. Meskipun pendidikan memiliki peran yang sangat strategis, kenyataannya kinerja pendidikan nasional masihjauh dari harapan. Banyak anggota masyarakat yang terus mengkritik sistem pendidikan nasional, termasuk peraturan perundang- undangannya, desain kurikulum, sistem evaluasi, dan anggaran pendidikan². Terlepas dari masalah yang ada dalam praktik pendidikan nasional, bangsa Indonesia harus menghadapi kompetisi global. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional tetap menjadi andalan bagi bangsa dan negara. Karena itulah, berbagai strategi perlu diupayakan untuk memperkuat sistem pendidikan nasional guna menuju masa depan Indonesia yanglebih cerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research. Metode ini mencakup pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan, dokumen resmi, serta sumber digital yang kredibel³. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji konsep pendidikan nasional dan pendidikan Islam dari perspektif sejarah serta pengaruhnya terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan penelitian dirumuskan untuk menganalisis sejarah perkembangan pendidikan nasional dan pendidikan Islam di Indonesia serta mengidentifikasi nilai-nilai yang mendasarikedua sistempendidikan tersebut. Tahap selanjutnya adalah kajian literatur. Dalam tahap ini, literatur yang relevan dengan topik penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku yang membahas sejarah pendidikan di Indonesia, artikel jurnal ilmiah yang mengkaji sistem pendidikan nasional dan pendidikan Islam, dokumen-dokumen resmi seperti undang- undang dankeputusan presiden yang terkait dengan pendidikan, serta karya-karya tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara dan pandangan tokoh-tokoh modernis dalam pendidikan Islam. Semua literatur ini disusun dalam daftarpustaka sebagai acuan dalam penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan perpustakaan fisik dan digital untuk memperoleh sumber primer dan sekunder. Literatur yang dikumpulkan ditelaah sedemikian rupa sehingga tidak memperoleh informasi terkait objek penelitian. Informasi tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan topik tertentu, seperti bahasa Hariduse, sejarah pendidikan Islam, nilai-nilai Alquran dan Hariduse. Analisis data dilakukan terhadap data yang dikumpulkan. Analisis ini meliputi uraian tentang sejarah perkembangan pendidikan nasional dan pendidikan Islam diIndonesia, analisis terhadap konsep-konsep pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara dan kaum modernis dalam pendidikan Islam, serta mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. pendidikan yang berkaitan dengan Al-Qura. Hasil analisis ini akan dihubungkan dengan teori-teori pendidikan yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik penelitian. Kesimpulan diambil dari hasil analisis data. kesimpulan ini menggambarkan sejarah dan perkembangan sistem pendidikan nasional dan pendidikan Islam Indonesia, peran

¹ Rochmat Wahab. *Menegakkan Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila*. (Jurnal Pendidikan Modern: 2021) Vol 2. No. 5. h 22

² Munirah. *Sistem Pendidikan Di Indonesia: antara keinginan dan realita* (Auladuna, Vol. 2 No. 2 Desember 2015), h 26

³ Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan (Library Research): NATURAL SCIENCE* (Jurnal Penelitian 2022) h. 43

pemangku kepentingan pendidikan dalam membentuk sistem pendidikan Indonesia, dan nilai-nilai yang mendasari pendidikan nasional dan pendidikan Islam. Selain itu juga disampaikan dampak hasil penelitian terhadap perkembangan sistem pendidikan Indonesia di masa depan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

Menurut Sunarya, pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang didasarkan pada landasan yang dijiwai oleh falsafah hidup berbangsa, yang bertujuan untuk mengabdikan pada cita-cita dan cita-cita bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan pendidikan adalah usaha untuk membimbing warga negara Indonesia menjadi individu yang berpancasila, berkepribadian yang berlandaskan ketuhanan, sadar akan masyarakat, dan mampu memanfaatkan alam sekitar⁴. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1, Pasal 1, Ayat 2 menyatakan: "Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945." Dasar ini tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 serta Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Bab XIII Pasal 31, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur oleh undang-undang⁵. Pendidikan nasional adalah kegiatan pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berakar pada nilai-nilai agama dan budaya nasional Indonesia, serta tanggap terhadap perubahan kebutuhan zaman. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas seluruh warga negara Indonesia dan mampu menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah⁶.

Pendidikan Islam dan Nasional Dalam Perspektif Sejarah

Menurut catatan sejarah, perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan munculnya dualisme pendidikan. Hal ini dimulai pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang memperkenalkan pola pendidikan Barat dan menerapkan sistem pendidikan sekuler. Di sisi lain, pendidikan agama Islam diwakili oleh pesantren yang fokus pada ilmu keislaman dengan pola tradisional. Dualisme ini berlanjut hingga Indonesia merdeka, namun pada awal abad ke-20 muncul upaya untuk mengintegrasikan kedua sistem tersebut melalui pendirian madrasah⁷. Dualisme dalam sistem pendidikan menyebabkan krisis nilai. Pendidikan Islam yang tidak menekankan pengetahuan eksperiensial cenderung menurun, dan pendidikan umum tentang pengetahuan agama lemah. Pendidikan Islam mempunyai dampak yang besar bagi Indonesia, karena telah dipraktikkan sejak lama sejak Islam masuk ke Indonesia. Lembaga pendidikan Islam tradisional dianggap tidak mampu bersaing dengan sekolah negeri yang didirikan Belanda dan mendapat kritik keras dari kaum modernis. Kelemahan lembaga pendidikan Islam tradisional antara lain: awal ketidakmampuan bergerak mengikuti perkembangan zaman. kedua, seluruh kegiatan terfokus pada Kyai. Ketiga, kurikulum dan metode pengajarannya masih tradisional dan hanya fokus pada kajian agama⁸. Di Sumatera Barat, perubahan besar terjadi dalam perkembangan lembaga pendidikan Islam pada awal abad ke-20, terutama di kalangan generasi muda (modernis). Mereka berhasil mengubah Surau

⁴ Khoirul Ikhwan. *Implementasi Standar Isi, Standar Proses, Dan Standar Kompetensi Lulusan Sebagai Standar Mutu Pendidikan Mts Negeri Di Kabupaten Tulungagung*. (Journal Pedagogia. Volume. 4, No. 1, Februari 2015), h 18

⁵ Melkianus Suluh. *Perspektif Pendidikan Nasional. Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: (e-Saintika. Vol. 2 No. 1 Desember 2018)*, h 5

⁶ Ibid

⁷ Jamal Mirdad. *Relevansi Pendidikan Islam Dan Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Al- Quran Dan Sejarah*. (eL- Hekam: Jurnal Studi Keislaman. 2020), h 12

⁸ Fasih. A. R. *Dasar-Dasar Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan Al-Hadist*. Al-Ishlah: Jurnal Studi Pendidikan, 16(1). 2019, h 26

menjadi madrasah yang berupaya memadukan kurikulum agama dan umum. Tokoh seperti Zainuddin Rabai dan Rama el Yunusia mendirikan seminari al-Diniya pada tahun 1915 dan seminari Diniya Putri pada tahun 1923. Kedua madrasah ini menjadi terkenal di Sumatera Barat Indonesia karena memadukan agama dan ilmu pengetahuan populer serta memiliki kurikulum dan operasional yang terorganisir dengan baik. Selanjutnya Haji Karim Amrullah mengubah sura jembatan kereta api Padang Panjang menjadi Sumatera Tawalib pada tahun 1916. Menyusul perubahan tersebut, Syekh Ibrahim Musa dan ulama lain dari Sumatera Barat mendirikan lembaga pendidikan yang diberi nama "Tawarib"⁹. Pada masa orde baru, pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972; Undang-undang tahun 1974 menyatakan bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan seluruh sistem pendidikan menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan ini mendapat tentangan dan tantangan keras dari umat Islam. Mereka khawatir pengaturan ini akan mengakibatkan madrasah dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga mengurangi mandat dan peran Kementerian Agama. Lebih lanjut, umat Islam memandang pengelolaan madrasah yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai upaya pemerintah Orde Baru untuk melakukan sekularisasi¹⁰.

Al Qur'an Sebagai Dasar Pendidikan

Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup di dunia dan akhirat. Mencapai kebahagiaan merupakan tujuan hidup manusia dan dapat dicapai dengan mengikuti ajaran Al-Quran dan Hadits Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci hakikat, proses, dan tujuan pendidikan, namun muncul beberapa istilah terkait pendidikan¹¹. Al-Quran memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan, hal ini ditandai dengan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Alaq 1-2:

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝

Artinya: (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. (2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. (Q.S Al Alaq 1-2).

Kata "iqra" pada ayat di atas berasal dari kata "qara'a" yang berarti "merakit" dan kata ini diterjemahkan "membaca". Karena yang dibaca adalah sesuatu yang tertulis atau diucapkan, maka arti kata ini adalah menyampaikan, mengkaji, menyelidiki, memperdalam. Kata menelaah, menelaah, menyelidiki dan mengkomunikasikan sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Oleh karena itu, perintah pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad adalah membaca dan menyebut Nama Allah. Hal ini karena menegaskan bahwa Allah SWT adalah sumber segala ilmu pengetahuan.¹² Al-Qur'an menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta orang yang berilmu pengetahuan sebagai firman Allah dalam Surah at-Taubah/9: 122 disebutkan:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ۝ ١٢٢

⁹ Moh. Sakir. Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Cendekia* Vol. 12 No. 1 Juni 2014, h 105

¹⁰ Ibid

¹¹ Robiatul Awwaliyah. Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam). *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol. 19, No. 1, Agustus 2018, h 7

¹² Hudaidah. Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *PENSA : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* Volume 3, Nomor 1, April 2021, h 9

Artinya: Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapasebagian darisetiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatankepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? (At-Taubah Ayat 122).

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Dengan ilmu, seseorang dapat membedakan mana yang benar dan salah, mana yang benar dan salah, mana yang mendatangkan manfaat dan kerugian. Lebih jauh lagi, Al-Quran juga menekankan tingginya tingkat orang yang berilmu. Hal ini dinyatakan dalam Firman Allah. Dia menjelaskan. Al Mujadilh: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ
أَوْثُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ ١١

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q. S. Al Mujadalah: 11).

Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berilmu diberi kemuliaan, kedudukan, dan keutamaan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa dasar pendidikan adalah Al-Quran¹³. Dalam Al-Quran, tujuan pendidikan adalah untuk dapat mengabdikan kepada Allah SWT dan menjalankan perintah-perintah-Nya dengan kebaikan dan kebenaran. Untuk mencapai hal tersebut, Tuhan memberikan potensi kepada manusia untuk dikembangkan melalui ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ada tiga kemungkinan yang Tuhan berikan kepada manusia dan manusia itu sendiri dapat berkembang¹⁴.

1. Aspek jasmani. Kondisi fisik menjadi salah satu pertimbangan dalam mengambil keputusan, karena tubuh yang sehat dan kuat adalah yang mampu mengembangkan potensi-potensi yang ada pada tubuh manusia sebagai berikut: Pendengaran, sentuhan, penciuman, penglihatan.
2. Aspek jiwa. Jiwa merupakan batin seseorang yang menjadi penggeraknya dalam melakukan aktivitas. Kemungkinan-kemungkinan yang dapat dikembangkan dalam jiwa berupa hati, nafs, pikiran dan keimanan. Ketika iman kita dikuatkan oleh pengetahuan yang kita terima dari Firman Tuhan, kita mengembangkan karakter yang teguh dan tabah untuk membela kebenarannya.
3. Aspek akal. Akal dapat dipergunakan dalam memahami sumber pengetahuan yang berasal dari Al-Qur'an. Untuk memperoleh pengetahuan tersebut setidaknya adagatigatahap yaitu 'ayn al-yaqin, 'ilmu al-yaqin dan haq alyaqiin.

Konsep dan Gagasan Ki Hadjar Dewantara

Konsep dan gagasan merupakan inti dari sistem dan model pendidikan modern. Sejak pendirian Taman Siswa pada tahun 1922, bahkan sebelumnya, Ki Hajar Dewantara telah merumuskan pemikiran-pemikirannya yang terkait dengan sistem pendidikan modern.

¹³ Heru Suparman. Konsep Pendidikan Modern dalam Perspektif Al-Qur ' an. IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam Volume 1 No. 01 2018, h 18

¹⁴ Suyatno. Dekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsystem Pendidikan Nasional. Jurnal Pendidikan Islam, 1(1). 2011, h 110

Berbeda dengan sistem pendidikan kolonial yang didasarkan pada pendidikan Barat dan bertujuan untuk mendukung pemerintah kolonial, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh Dewantara didasarkan pada keseimbangan yang dinamis. Ini merupakan akulturasi antara metode dan sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh asing dengan sistem yang diakui melalui masyarakat Indonesia¹⁵. Dewantara mengadopsi konsep-konsep dari tokoh-tokoh asing seperti Tagore, Montessori, dan Froebel, sementara sistem paguron diakui melalui interaksi formal dengan masyarakat tradisional Indonesia. Pendekatan pondok dipilih karena melibatkan semua pihak terkait, termasuk murid, guru, keluarga, dan masyarakat, serta menekankan keseimbangan dinamis antara pendidikan dan pengajaran, antara emosionalitas dan intelektualitas, serta antara kebutuhan jasmani dan rohani. Meskipun Dewantara sebagai elite intelektual modern memiliki pemahaman yang kuat tentang sistem pendidikan Barat daripengalamannya di Belanda, dia memilih untuk mengembangkan gagasan-gagasan asli yang sesuai dengan konteks Indonesia. Dengan menggunakan pengalaman tersebut, Dewantara lebih mematangkan konsep-konsepnya yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Konsep-konsep tersebut masih relevan hingga saat ini. Prinsip "tut wuri handayani" menjadi semboyan dalam pengembangan pendidikan modern, yang berbeda dengan pendidikan Barat yang cenderung menekankan tingkat intelektualitas yang tinggi. Taman Siswa mengadopsi pendekatan yang lebih santun dan mendampingi murid dari belakang, memberikan arahan sesuai dengan kemampuan mereka. Pendekatan ini memungkinkan perkembangan sesuai dengan bakat dan lingkungan, secara alami menggali potensi terpendam dalam diri anak didik, sesuai dengan kondisi internal mereka¹⁶.

Pendidikan Nasional Menggali Kepribadian Melalui Metode-Metode Baru

Pendidikan nasional dibangun dengan tujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang dapat berkontribusi dalam memajukan bangsa Indonesia. Lembaga pendidikan, guru-guru, dan staf pendukungnya telah disesuaikan dengan konteks lokal sejak awal, sehingga dapat mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin timbul akibat kesulitan ekonomi maupun politik, termasuk keterbatasan dana dan larangan dari pemerintah kolonial. Perhatian terhadap nilai-nilai kepribadian dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa dalam budaya lokal terdapat kekayaan sosio-kultural yang penting. Peninggalan sejarah dan arkeologi menunjukkan bahwa di kepulauan Nusantara terdapat beragam nilai etika, estetika, religi, dan kultural yang memiliki peran besar dalam membangun kebudayaan yang baru. Oleh karena itu, nilai-nilai ini perlu digali dan dikembangkan lebih lanjut, terutama untuk menemukan pola-pola kebudayaan yang inovatif. Penggalan terhadap aspek-aspek kepribadian dan tradisi tidak boleh dilakukan dengan cara-cara konvensional. Sebaliknya, metode yang digunakan harus senantiasa baru dan relevan. Dalam prakteknya, Dewantara terus memanfaatkan metode-metode terkini yang dianggap relevan. Sebagai perguruan nasional yang terkenal di Indonesia, Taman Siswa juga menjalin hubungan dengan perguruan-perguruan di luar negeri yang telah berhasil memajukan bangsanya, seperti Shanti Niketan yang dipimpin oleh Rabindranath Tagore di India, Casa dei bambini yang dipimpin oleh Montessori di Italia, dan Kindergarten yang dipimpin oleh Froebel di Jerman¹⁷. Mengenai pendidikan nasional dalam konteks zaman kemerdekaan, termasuk prediksi mengenai masa depan pendidikan dan pengajarannya, perlu diperkuat dengan alasan-alasan yang lebih mendasar. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kemajuan sejati suatu bangsa terletak

¹⁵ Made Suastika. Ki Hadjar Dewantara Pelopor Pendidikan Nasional. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*.

¹⁶ Ahmad Rifai. Relavansi pendidikan Agama Islam Terintegrasi Dalam Membangun Karakter Bangsa di Era Digital 4.0. *El-Arbah*, 4(1). 2020, h 31

¹⁷ Imam Rohani. Kajian Kebijakan Pendidikan Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Tarbiyah IAIRMN* ngabar Ponorogo. 2019, h 18

pada kemajuan dalam bidang pendidikan dan pengajarannya. Kesejajaran antara kemajuan infrastruktur material dan perkembangan ideologi menjadi kunci keberhasilan. Kekayaan alam yang melimpah harus didukung oleh keunggulan intelektual dalam pengelolaannya, sehingga masyarakat dapat mencapaikemakmuran yang merata. Permasalahan yang terkait dengan bangsa Indonesia adalah persoalan yang besar dan serius. Pertama, jumlah penduduk yang besar dan tersebar di seluruh pelosok negeri membuat sulitnya akses terhadap informasi modern, yang pada gilirannya sulit untuk menyebarkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengajaran. Kedua, sebagai bangsa yang lama berada di bawah pemerintahan kolonial, kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengajaran sulit ditanamkan. Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana informasi, terutama media massa dan literatur, juga menjadi hambatan dalam menyebarkan kesadaran tersebut. Taman Siswa telah menyadari kemungkinan-kemungkinan tersebut. Sistem paguron, sebagai contoh, dirancang untuk menyesuaikan diri dengan sistem pondok di satu sisi danmengatasikendalabiaya di sisi lainnya. Sistem paguron, yang telah dikenal sejak zaman dahulu, secara tidak langsung meningkatkan minat belajar, karena masyarakat terbiasa dengan sistem yang sudah dikenal sebelumnya, bukan dengan pendekatan modern yang asing. Dari segi pendanaan, sistem paguron memungkinkan kolaborasi antara masyarakat mampu dan tidak mampu. Dengan demikian, Taman Siswadapat tetap berjalan meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit¹⁸.

Idealita Sistem Pendidikan Nasional

Setelah memperhatikan sejumlah pemaparan berkenaan dengan praktek pendidikan nasional dewasa ini, kiranya ke depan sistem pendidikan nasional seyogyanya dapat diwujudkan sebagaimana dapat dirumuskan berikutini¹⁹:

1. Untuk memperlancar operasionalisasi pendidikan di semua tingkat, jenis, dan unit pendidikan, peraturan perundang-undangan bidang pendidikan perlu diselesaikan dengan cepat dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk stakeholders di tingkat nasional, regional, dan institusional. Optimalisasi koherensi antara peraturan-peraturan tersebut juga diperlukan untuk menghindarikonflik yang mungkinginterjadi.
2. Pentingnya membebaskan sistem pendidikan dari diskriminasi berdasarkan prinsip-prinsip HAM harus ditekankan dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini akan menjamin demokratisasi pendidikan di seluruh Indonesia. Pendidikan harus tetap menghindari marginalisasi terhadap kelompok yang kurang beruntung dan sebaliknya, memberikan perhatian khusus untuk menjaga martabat mereka.
3. Peran peserta didik sebagai bagian penting dalam proses pendidikan dan evaluasi pembelajaran harus diakui. Penghargaan terhadap eksistensi peserta didik harus mencakup penilaian yang mempertimbangkan kondisi dan kemampuan mereka serta kemajuan yang dicapai sesuai dengan potensi individumasing-masing, bukan hanya fokus pada kesuksesan atau kegagalan dalam menyelesaikan pendidikan.
4. Pembangunan kurikulum harus mempertimbangkan berbagai aspek penting, tidak hanya berdasarkan standar yang ada seperti standar isi dan kompetensi lulusan, tetapi juga mengakomodasi potensi dan kebutuhan peserta didik serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berubah. Kurikulum harus dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat dan peserta didik²⁰. Lebih lanjut,

¹⁸ Samrin. Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Al- Ta'dib* Vol. 8 No. 1. 2021, h 53

¹⁹ Susan Noor Farida. Hadis-Hadis Tentang Pendidikan (Suatu Telaah tentang Pentingnya Pendidikan Anak). *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 1, 1 (September 2016), h 42

²⁰ Hengki Nurhuda. Masalah-Masalah Pendidikan Nasional; Faktor-faktor Dan Solusi Yang Ditawarkan. *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar*. 2019, h 37

nilai-nilai Pancasila juga harus diperhatikan agar Pancasila menjadi dasar sistem pendidikan nasional, khususnya melalui mata pelajaran seperti agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memberikan rambu-rambu yang memudahkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Metode ini mungkin lebih efektif dibandingkan dengan metode yang digunakan pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, yang secara eksplisit memuat tema-tema pedagogi Pancasila, namun sangat politis, dan pendekatan yang digunakan cenderung bersifat dogmatis dan kurang bernuansa humanistik. Kejadian ini bahkan tidak membuka kesempatan yang cukup untuk melakukan refleksi dan kritik. Akibatnya, banyak kejadian kontra produktif yang terjadi.

5. Upaya untuk meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik serta tenaga kependidikan harus selaras dengan tuntutan profesionalisme yang dihadapi oleh guru, dosen, dan tenaga pendidik lainnya. Untuk menegakkan standar profesionalisme, organisasi profesi harus terhindar dari campur tangan politik yang berlebihan dan terus mempertahankan komitmen terhadap standar profesionalisme, termasuk dalam penerapan kode etik organisasi profesi. Sertifikasi guru atau dosen sebaiknya bersifat temporal daripada permanen, sehingga dapat menjamin pelayanan publik yang memuaskan. Legalisasi sertifikat profesi pendidik harus dilakukan secara berkala, dengan waktu yang ditentukan berdasarkan hasil kajian dan kesepakatan antara parapemangku kepentingan.
6. Keberhasilan dalam pengelolaan lembaga pendidikan tidak terlepas dari peran penting kepemimpinan pendidikan. Pemimpin lembaga pendidikan yang efektif dan produktif harus memelihara nilai-nilai dan tujuan bersama, sehingga lembaga yang dipimpinnya dapat beroperasi dengan efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Kepemimpinan pendidikan harus lebih menekankan pada kepemimpinan akademis dari pada birokratis. Di Indonesia, kepemimpinan pendidikan harus menekankan pada pemberian teladan, membangun semangat, dan merangsang kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dan pendidikan.
7. Proses pembelajaran yang efektif harus mengutamakan transfer prinsip daripada transfer informasi, mendorong berpikir kreatif daripada berpikir konvensional, serta menekankan pada pembelajaran kolaboratif daripada kompetitif. Selain memperhatikan efek instruksional, proses pembelajaran juga harus memperhatikan efek pengasuhan.
8. Untuk memastikan bahwa hasil pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan institusional, sistem evaluasi pembelajaran harus difokuskan pada penilaian aspek non-akademik seperti moral, kepribadian, dan keterampilan, yang sama pentingnya dengan aspek akademik. Dengan demikian, lulusan dapat mencerminkan individu yang berwawasan luas dan berkualitas secara menyeluruh²¹.
9. Untuk menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, selain otonomi pendidikan, perlu dilakukan harmonisasi pengelolaan pendidikan dengan keseimbangan antara desentralisasi dan sentralisasi. Hal ini memastikan bahwa kekuatan dan keunggulan lokal tetap terpelihara dengan tetap menjaga keutuhan satu negara. Sebagaimana disampaikan Pak Tirard, pendidikan nasional harus mampu mempersatukan bangsa. Kalaupun pemimpin daerah diberi otonomi penuh, jabatan struktural di bidang pendidikan akan lebih mudah dikendalikan jika dipimpin oleh orang yang ahli di bidangnya, sehingga kepentingan profesional akan lebih penting dibandingkan kepentingan politik diharapkan kepentingan perusahaan diutamakan.
10. Untuk mendukung terselenggaranya pendidikan yang bermutu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengembangkan dan menerapkan standar sarana dan prasarana

²¹ Deni Lesmana. Kandungan Nilai Dalam Tujuan Pendidikan Nasional. (*Kordinat* Vol. XVII No.1 April 2018), h 27

pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan. Namun, untuk menjamin praktik pendidikan yang independen terhadap lingkungan fisik, sosial, dan budaya, maka lingkungan harus diperhatikan dan dimanfaatkan sebagai sumber informasi dan fasilitas pendidikan yang bermakna. Selain fakta bahwa upaya-upaya ini meningkatkan efisiensi, ada kemungkinan besar bahwa merangkul kreativitas dan bertindak berdasarkan situasi dapat menumbuhkan kreativitas yang lebih besar.

Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan umum dan pendidikan Islam merupakan dua elemen integral dalam sistem pendidikan nasional, saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan individu yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, serta memiliki kesadaran demokratis dan tanggung jawab sebagai warga negara. Dalam kerangka ini, pendidikan Islam berperan dalam membangun dan membina iman, akhlak, moral, dan kepribadian, serta memperkaya pengetahuan dan ilmu bagi seluruh masyarakat Indonesia. Idealnya, pendidikan Islam diarahkan untuk mentransformasi nilai-nilai yang dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa²². Lembaga-lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah, diharapkan mampu menyamakan posisinya dengan pendidikan umum dalam hal penguasaan ilmu. Prinsip kesetaraan ini, yang diatur dalam UUSPN 2003, menegaskan bahwa pendidikan Islam juga harus mampu mengurangi kesenjangan dalam kualitas pendidikan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Lebih dari sekadar mempelajari ilmu agama (ilmu fardlu 'Ain), pendidikan Islam juga diharapkan dapat mengintegrasikan ilmu pengetahuan melalui panca indera (ilmu fardlukifayah). Tujuan utama pendirian lembaga pendidikan Islam pada umumnya adalah membentuk karakter manusia yang ideal, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang menginginkan masyarakat yang berbudaya, adil, makmur, dan bermartabat. Kesamaan tujuan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak bertentangan, bahkan saling melengkapi. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional juga mencakup salah satu tujuan dalam pendidikan Islam, sehingga tidak perlu diragukan lagi²³.

Paradigma yang dibangun pendidikan Islam harus menyimpang dari normativitas Islam tanpa melupakan realitas pendidikan Islam yang dibutuhkan umat Islam. Hal ini untuk menghindari visi atau misi yang terlalu idealis dan tidak mampu menjawab permasalahan praktis umat Islam yang menjadi sasaran pendidikan Islam. Jika kita terlalu banyak memaksakan konsep-konsep idealis pada paradigma pendidikan Islam, maka kita akan menyimpang dari tujuan awal kita. Meskipun Indonesia tidak secara tegas digambarkan sebagai negara agama, baik sebagai negara yang berdasarkan ajaran agama tertentu maupun sebagai negara sekuler, namun Indonesia adalah negara Pancasila. Menurut Effendi, Indonesia bersama negara Pancasila sedang menempuh jalur antara negara agama dan negara sekuler. Negara Pancasila menjamin kebebasan seluruh warga negara untuk menjalankan agamanya dan berupaya menjaga akhlak berdasarkan nilai-nilai Pancasila²⁴. Pendidikan agama Islam di Indonesia berdasarkan peraturan perundangundangan yang diatur secara langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan formal. Pendidikan nasional yang didefinisikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 adalah pendidikan yang berakar pada nilai-nilai agama, budaya, dan kebangsaan Indonesia serta tanggap terhadap perubahan zaman, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain,

²² Yudi Hartono. Pendidikan Nasional dan Kualitas Manusia Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Agastya* Vol 7 No 2 Juli 2017, h 28

²³ Nanang Nuryanta. Reorientasi Pendidikan Nasional Dalam Menyiapkan Daya Saing Bangsa. *Jurnal El-Tarbawi*. 2022, h 283

²⁴ Karim Amarullah. Dasar-Dasar Pendidikan Islam. *At-Ta'lim Jurnal Pendidikan Agama Islam*. 2022, h 12

sistem pendidikan suatu negara terdiri dari seluruh unsur pendidikan yang bekerja sama secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Daulay mengemukakan bahwa untuk meletakkan kedudukan Islam dalam sistem pendidikan nasional perlu diklasifikasi pada empat hal, yaitu²⁵:

1. Lembaga pendidikan formal
 - a. Pendidikan usia dini; pendidikan formal pada pendidikan usia dini ini berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), dan atau bentuk lainnya yang sederajat.
 - b. Pendidikan dasar; pendidikan formal pada pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan atau bentuk lainnya yang sederajat. Serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan atau bentuk lainnya yang sederajat.
 - c. Pendidikan menengah; pendidikan formal pada pendidikan menengah berbentuk sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), dan atau bentuk lainnya yang sederajat.
 - d. Pendidikan tinggi; pendidikan formal pada pendidikan tinggi dapat berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.
2. Lembaga pendidikan nonformal, terdiri dari: lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majlis ta'lim, dan satuan pendidikan yang sejenis.
3. Lembaga pendidikan informal, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan berupa pendidikan keluarga dan lingkungan yang membentuk kegiatan belajar secara mandiri.
4. Lembaga pendidikan keagamaan
 - a. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan atau menjadi ahli agama.
 - c. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
 - d. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan atau bentuk lain yang sejenis²⁶.

KESIMPULAN

Dalam perjalanan kami memikirkan pentingnya pendidikan nasional, kami menelusuri pentingnya sistem pendidikan nasional hingga konsep-konsep kunci dalam memajukan arah pendidikan di Indonesia. Kami fokus pada tantangan, sejarah, dan bahkan ide-ide inovatif dari para pemikir dan praktisi pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara. Kini, kita tidak hanya harus mempertimbangkan perspektif yang berbeda, namun juga melihat ke masa depan. Sebagai penutup halaman ini, kami mengingat kembali seruan kami untuk memperkuat sistem pendidikan nasional dan menjadikannya tulang punggung pembangunan bangsa Indonesia di masa depan. Mungkin ini merupakan panggilan bagi kita semua untuk menggali lebih dalam nilai-nilai pendidikan, menutup kesenjangan, dan merangkul inovasi di era yang terus berubah. Sebagai sebuah bangsa, kita menghadapi tantangan besar di bidang pendidikan, namun di sinilah kita dapat menemukan dorongan untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Memahami warisan dan visi kami untuk masa depan, kami berupaya membangun masa depan

²⁵ Pepen Supendi. Variasi (Format) Sistem Pendidikan di Indonesia. *Almufida* Vol. 1 No. 1 Juli- Desember 2016, h 170

²⁶ Bagus Setiawan. Dasar Dasar History Sistem Pendidikan Nasional. *Cendekia* (2023), h 27

yang lebih baik bagi generasi mendatang dengan berinvestasi pada pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan progresif. Dengan cara ini, kita tidak hanya membuka pintu terhadap pengetahuan, namun juga membuka jalan menuju masyarakat yang lebih adil, kuat, dan berkeadilan. Dengan semangat gotong royong dan tekad, marilah kita bersama-sama menorehkan babak baru dalam sejarah pendidikan Indonesia yang berdaya, bermakna, dan inspiratif bagi semua. Kini saatnya bertindak untuk mewujudkan visi pendidikan yang lebih baik di negeri ini. Karena pendidikan merupakan investasi terbesar bukan hanya di masa kini namun juga di masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai. 2020. Relevansi pendidikan Agama Islam Terintegrasi Dalam Membangun Karakter Bangsa di Era Digital 4.0. *El-Arbah*, 4(1).
- Bagus Setiawan. 2023. Dasar Dasar History Sistem Pendidikan Nasional. *Cendekia*
- Deni Lesmana. 2018. Kandungan Nilai Dalam Tujuan Pendidikan Nasional. (*Kordinat* Vol. XVII No.1 April).
- Fasih. A. R. 2019. Dasar-Dasar Pendidikan Islam Dalam Tinjauan Al-Qur'an Dan AlHadist. *Al-Ishlah: Jurnal Studi Pendidikan*, 16(1).
- Hengki Nurhuda. 2019. Masalah-Masalah Pendidikan Nasional; Faktorfaktor Dan Solusi Yang Ditawarkan. *Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Dasar*.
- Heru Suparman. 2018. Konsep Pendidikan Modern dalam Perspektif Al-Qur ' an. *IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* Volume 1 No. 01
- Hudaidah. 2021. Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *PENSA : Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* Volume 3, Nomor 1, April
- Imam Rohani. 2019. Kajian Kebijakan Pendidikan Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Tarbiyah I AIRM Ngabar Ponorogo*.
- Jamal Mirdad. 2020. Relevansi Pendidikan Islam Dan Pendidikan Nasional Dalam
- Karim Amarullah. 2022. Dasar-Dasar Pendidikan Islam. *At -Ta'lim Jurnal Pendidikan*
- Khoirul Ikhwan. 2015. Implementasi Standar Isi, Standar Proses, Dan Standar Kompetensi Lulusan Sebagai Standar Mutu Pendidikan Mts Negeri Di Kabupaten Tulungagung. *Journal Pedagogia*. Volume. 4, No. 1, Februari
- Made Suastika. 2021. Ki Hadjar Dewantara Pelopor Pendidikan Nasional. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*.
- Melkianus Suluh. 2018. Perspektif Pendidikan Nasional. *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmu Pendidikan: e-Saintika*. Vol. 2 No. 1 Desember
- Milya Sari, Penelitian Kepustakaan (Library Research): *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian* 2022
- Moh. Sakir. 2014. Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Cendekia* Vol.
- Munirah. 2015. Sistem Pendidikan Di Indonesia: antara keinginan dan realita. *Auladuna*, Vol. 2 No. 2 Desember
- Nanang Nuryanta. 2022. Reorientasi Pendidikan Nasional Dalam Menyiapkan Daya Saing Bangsa. *Jurnal El-Tarbawi*.
- Pepen Supendi. 2016. Variasi (Format) Sistem Pendidikan di Indonesia. *Almufida* Vol. I No. 1 Juli-Desember
- Perspektif Al-Quran Dan Sejarah. *eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman*.
- Robiatul Awwaliyah. 2018. Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam). *Jurnal Ilmiah Didaktika* Vol. 19, No. 1, Agustus
- Rochmat Wahab. 2021. Menegakkan Sistem Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Modern*. Vol 2 No 5.

- Samrin. 2021. Pendidikan Agama Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Al-Ta'dib* Vol. 8 No. 1.
- Susan Noor Farida. 2016. Hadis-Hadis Tentang Pendidikan (Suatu Telaah tentang Pentingnya Pendidikan Anak). *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 1, 1 (September).
- Suyatno. 2011. Dekonstruksi Pendidikan Islam Sebagai Subsistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1).
- Yudi Hartono. 2017. Pendidikan Nasional dan Kualitas Manusia Indonesia Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Agastya* Vol 7 No 2 Juli 2017, h 28